

RESENSI BUKU
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI :
Mentransformasikan Semangat Wirausaha
ke dalam Sektor Publik

Oleh : Sukidjo

- Judul asli** : *Reinventing Government : How the Entrepreneurial is Transforming the Public Sector*
- Pengarang** : David Osborne & Ted Gaebler
- Penterjemah** : Abdul Rosyid
- Tahun Penerbitan** : 2000
- Penerbit** : Pustakawan Binaman Pressindo
- ISBN** : 979-442-043-3
- Jumlah Halaman** : 400 + xx

Buku ini terdiri atas 11 bab dan dilengkapi dengan 2 lampiran dan Indeks. Di dalam Pendahuluan diuraikan tentang perestorika Amerika Serikat yang memberikan gambaran bahwa sejak tahun 1980 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah menurun, bahkan pada tahun 1990-an penurunan kepercayaan tersebut cukup tajam sehingga dapat dikatakan pemerintahan sudah mati atau menemui jalan buntu. Sehubungan dengan itu, tidak mengherankan jika hanya 5 % warga Amerika Serikat yang akan memilih jabatan dalam pemerintahan dan hanya 13% dari pegawai tinggi federal yang merekomendasikan karier pegawai negeri. Pada tahun 1990 USA mengalami defisit yang

cukup besar dan untuk menutupnya dilakukan dengan pajak. Namun cara ini banyak ditentang sehingga dalam tahun 1990-1991 para pemimpin pemerintah memperdebatkan pilihan antara pengabdian dan pelayanan yang lebih sedikit atau pajak yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kecenderungan para pimpinan menghabiskan anggaran pada setiap akhir tahun, maka dikembangkan strategi, dimana pengelolaan anggaran disesuaikan pada orientasi pada hasil disertai upaya untuk penghematan serta dikembangkan upaya memberikan bonus kepada mereka yang berprestasi dengan menggunakan sistem manajemen wirausaha publik.

Dalam bab selanjutnya yang merupakan inti pada dasarnya mengemukakan perlunya perubahan peran pemerintah dari peran tradisional yang sifatnya mengatur, menguasai menuju ke arah memberikan kesempatan kepada masyarakat. Langkah pertama untuk mewirauahakan birokrasi adalah pemerintah lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat mengarahkan dari pada kegiatan yang sifatnya mengatur. Konsekuensinya, perlu ada redistribusi kekuasaan dari pemerintah. Secara tradisional, peran pemerintah adalah mengatur dan kurang mengedepankan dialog. Dalam konsep baru, peran pemerintah diharapkan lebih bersifat mengarahkan pada dialog serta membangun kemitraan dengan swasta khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan.

Langkah kedua dilakukan dengan cara menempatkan pemerintah sebagai milik masyarakat, dengan mengutamakan memberikan wewenang ketimbang melayani. Pemberian wewenang kepada masyarakat dipandang sebagai suatu tradisi yang telah berlaku di Amerika, mengingat negara Amerika Serikat merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok organisasi masyarakat yang mandiri. Jika para birokrat tetap mengendalikan pelayanan publik, berarti akan mengurangi kepercayaan dan kompetensi warga masyarakat sehingga akan berdampak pada ketergantungan, dan adanya keter-

gantungan sudah tentu kurang menguntungkan. Dengan adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat akan meningkat. Dicontohkan dalam bidang pendidikan, para orang tua membentuk dewan sekolah dan dewan ini bertindak sebagai direksi, mempekerjakan dan menentukan kepala sekolah atas dasar jasa atau prestasi kerjanya dan bukan atas dasar senioritas belaka. Dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat diharapkan akan dapat membangkitkan kepercayaan serta mampu memberikan solusi yang lebih baik, mengingat masyarakat memiliki komitmen yang lebih tinggi serta lebih memahami masalahnya, dan dapat menegakkan standar perilaku yang lebih efektif.

Langkah ketiga perlunya pemerintahan yang kompetitif yakni perlunya persaingan dalam memberikan pelayanan. Kompetisi yang sehat akan memberikan keuntungan antara lain terjadinya efisiensi yang lebih besar, meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan, mendorong inovasi, dan membangkitkan rasa harga diri maupun semangat juang. Langkah keempat, perlu adanya perubahan dalam tata kerja pemerintahan, yakni mengubah dari sistem pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan menuju pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Misi yang akan dicapai hendaknya dipandang sebagai arah kebijakan pemerintah. Organisasi yang digerakkan dengan misi ternyata memiliki keuntungan, yakni akan lebih efisien dan efektif, inovatif, fleksibel, serta memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, disarankan dalam menyusun anggaran perlu didasarkan pada misi. Demikian juga dalam menentukan personalia. Untuk dapat membangun organisasi yang digerakkan dengan misi, perlu ada pernyataan tentang misi, serta mengorganisasi berdasarkan misi dan bukan berdasarkan atas kekuasaan.

Langkah kelima adalah menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Untuk menilai suatu hasil dilakukan dengan kriteria kepuasan pelayanan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kualitas

lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sebaiknya mengembangkan sistem insentif sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil yang berprestasi. Langkah keenam, adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, yakni berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan (masyarakat) dan bukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Jika orientasi pemerintah kepada birokrasi dikawatirkan akan dapat menimbulkan arogansi birokrasi dan atau lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok kepentingan. Masyarakat merupakan pelanggan pelayanan pemerintah, sehingga pelayanan kepada rakyat akan semakin baik. Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada kebutuhan rakyat. Langkah ketujuh adalah pemerintahan wirausaha merupakan pemerintahan yang berorientasi untuk menghasilkan dari pada hanya sekedar membelanjaan. Jika orientasi pemerintahan hanya pada pengeluaran maka akan terjadi pemborosan. Untuk itu perlu ada perubahan orientasi yang mendorong kekuatan dan motif bahwa setiap pengeluaran hendaknya dapat menghasilkan target tertentu. Memang diakui bahwa untuk dapat menghasilkan diperlukan biaya. Biaya tersebut dapat dikenakan kepada mereka yang mendapatkan manfaat kegiatan yang bersangkutan. Pembiayaan atau pengeluaran hendaknya dipandang sebagai kegiatan menabung sehingga setiap pengeluaran atau investasi dimasukkan untuk mendapatkan hasil. Untuk itu perlu diadakan perubahan pada diri manajer publik termasuk pada birokrasi agar selalu bertindak dan berpikir sebagai wirausaha, bersifat inovatif, efisien, serta berani melakukan investasi.

Langkah kedelapan adalah pemerintahan yang antisipatif sehingga perlu bertindak cepat dan mempersiapkan diri terhadap keadaan yang akan terjadi berdasarkan data dan trend yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, perlu menerapkan prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati. Dalam sistem pemerintahan tradisional, umumnya kegiatan yang dilakukan lebih banyak yang bersifat reaktif, menyelenggarakan

pelayanan jasa untuk mengurangi masalah. Misalnya untuk menanggulangi masalah kesehatan, pemerintah mendanai perawatan kesehatan. Untuk mengurangi kejahatan, pemerintah mendanai polisi yang lebih banyak. Dalam pemerintahan yang antisipatif, dalam mengurangi masalah kesehatan pemerintah membangun sarana air bersih, pengolahan limbah, pengawasan makanan, menyelenggarakan vaksinasi dan sebagainya, yang semua kegiatan merupakan upaya pencegahan. Kegiatan pencegahan macam ini diharapkan akan lebih dapat memecahkan masalah dari pada hanya memberikan pelayanan jasa. Untuk dapat mengantisipasi keadaan yang akan timbul perlu melakukan analisis berbagi tantangan yang kemungkinan akan terjadi kemudian mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya antisipatif terhadap apa yang akan terjadi diharapkan dampak negatif akan dapat diminimalisasi serta pembiayaan untuk mengatasi hal tersebut akan lebih sedikit, serta akan dapat menghindarkan diri dari kemungkinan krisis yang timbul. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah hendaknya memiliki pandangan ke depan dan dapat mengantisipasi akan yang akan terjadi pada masa depan, selanjutnya merumuskan sejumlah kegiatan dalam suatu kerangka rencana strategis. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar kegiatan yang sifatnya rutin. Untuk keperluan penyusunan strategis dan penganggaran jangka panjang dapat dibentuk komisi masa depan.

Langkah ke sembilan adalah pemerintahan desentralisasi. Pada waktu lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang tersentralisasi sangat diperlukan. Karena pada masa itu teknologi informasi masih primitif, komunikasi antar lokasi masih sangat lamban, sumber daya manusia masih lemah. Namun, pada masa kini keadaan telah berubah, dimana teknologi komunikasi berkembang pesat, komunikasi antar daerah berjalan lancar bahkan untuk daerah terpencilpun dapat terlayani komunikasi, sumber daya manusia berkualitas, sarana dan prasarana umum lengkap dan memadai. Bahkan perubahan keadaan dalam era

globalisasi dapat dikatakan luar biasa, sehingga wajar jika dewasa ini disebut sebagai era komunikasi dan teknologi. Apa yang terjadi di suatu wilayah, dengan segera dapat diketahui oleh daerah lainnya. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi maka pemerintahan yang berjiwa wirausaha menghendaki terjadinya desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan atau lembaga yang terdesentralisasi memiliki keunggulan : (a) lebih fleksibel karena dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang berubah; (b) lebih efektif karena dapat mengetahui perkembangan setiap saat dan menciptakan solusi yang lebih baik; (c) lebih inovatif karena terbukanya gagasan dan ide dari para pelaksana di lapangan dan (d) memberikan semangat kerja yang lebih tinggi, komitmen yang tinggi sehingga produktivitas yang dicapai akan semakin meningkat. Dalam rangka mendesentralisasikan organisasi publik perlu dikembangkan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif akan berjalan baik dalam organisasi publik yang entrepreneurial pada seluruh tingkatan organisasi.

Langkah kesepuluh adalah pemerintahan yang berorientasi pada pasar, dimana perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan melalui mekanisme pasar. Jika dibandingkan dengan manajemen administratif, mekanisme pasar memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (a) lebih kompetitif, sehingga lebih efisien serta mutu produk dan pelayanan terjaga; (b) mendorong pelanggan untuk membuat pilihan, mengingat jumlah produk relatif cukup banyak baik jumlah maupun jenisnya; (c) dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha, Pemerintah menyadari perlunya pengembangan budaya wirausaha bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya sejak akhir Orde Baru, pemerintah telah berusaha keras, mengembangkan budaya wirausaha dengan melibatkan 17 menteri, gubernur bank sentral serta seluruh

gubernur. Ketujuh belas menteri yang dilibatkan dalam pengembangan budaya kewirausahaan adalah menteri : Koperasi dan PPK; Perhubungan, Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Keuangan, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kebudayaan, Peneraangan, Agama, Dalam negeri, Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, Meneg Kependudukan / Ketua BKKBN, Meneg Pemuda dan Olah raga. Pengembangan budaya wirausaha ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Jika dibandingkan dengan ide mewirausahaan birokrasi, pembudayaan kewirausahaan ini masih bersifat sentralistik sesuai dengan pola kepemimpinan pada saat itu. Dalam Pemerintahan Reformasi, yang dimulai oleh Presiden Habibie hingga kini pembudayaan kewirausahaan dilakukan secara terdesentralisasi yakni pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi UKM dan golongan ekonomi lemah serta memberikan kredit lunak bagi UKM. Pada tingkat perguruan tinggi diprogramkan pula kegiatan untuk membudayakan kewirausahaan baik dengan jalan memberikan kesempatan yang luas menyebarluaskan pengetahuan dasar kewirausahaan, pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa, meningkatkan kegiatan magang kewirausahaan, penyelenggaraan kopnsultasi bisnis dan penempatan kerja, menyelenggarakan inkubator bisnis, serta perintisan program usaha dan jasa industri. Untuk merealisasi program pembudayaan kewirausahaan di perguruan tinggi, pemerintah memberikan dana stimulan yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Tinggi yang kemudian dituangkan dalam Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan.